

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan informasi yang terdapat dan hasil analisis yang telah dijelaskan, penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut.

##### **1. Faktor-Faktor Penyebab Capaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Kota Bekasi di Bawah Nasional**

Menjawab pertanyaan penelitian mengapa capaian akses air minum jaringan perpipaan Kota Bekasi masih di bawah target nasional? Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- 1) Perbandingan antara penambahan jumlah SR/akses air minum jaringan perpipaan dan peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang. Secara persentase, jumlah penduduk meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan penambahan jumlah SR. Maka jika tidak ada upaya tambahan, peningkatan akses air minum jaringan perpipaan (SR) Kota Bekasi tetap akan di bawah target nasional.
- 2) Pembangunan sektor air minum kurang menjadi prioritas. Beberapa indikasi ke arah itu terlihat mulai dari minimnya komitmen dan prioritas Pemda Kota Bekasi terhadap pembangunan air minum yang masih tertinggal dari pembangunan jalan bahkan mall, air minum juga masih kurang menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan baik dari sisi anggaran maupun target, dan belum selarasnya target pembangunan air minum antara pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Pengelolaan DAK air minum belum cukup optimal. Kontribusi penambahan SR dari kegiatan DAK saat ini akan lebih besar jika pengelolaan DAK air

minum lebih optimal. Kota Bekasi menyisakan sekitar 10-20% alokasi DAK air minum yang tidak terserap pada tiap tahunnya. Anggaran yang tidak terserap tersebut sebetulnya bisa menjadi tambahan output perluasan cakupan SR/akses air minum jaringan perpipaan. Optimalisasi pengelolaan DAK perlu dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan monitoring-evaluasi dan pelaporan.

- 4) DAK air minum berkontribusi terhadap lebih dari setengah penambahan SR Kota Bekasi, sayangnya output kegiatan DAK air minum Kota Bekasi tidak pernah mencapai 100%. Capaian output kegiatan DAK air minum berada di kisaran 80% tiap tahun, artinya belum optimal. Capaian SR saat ini akan lebih tinggi jika output DAK air minumnya juga tercapai maksimal.
- 5) Keterbatasan sumber air baku dan tingginya harga produksi. Air baku Kota Bekasi sangat terbatas, sementara sebagian yang masih ada statusnya tercemar. Imbasnya Pemda Kota Bekasi dan operator air minum harus mengeluarkan ongkos lebih untuk menyediakan air bersih, padahal ongkos produksi tanpa menambahkan ongkos air baku saja sudah terbilang tinggi. Maka, peningkatan jumlah SR tiap tahun belum cukup signifikan untuk mengejar target nasional.

## **2. Strategi Pemerintah Kota Bekasi Meningkatkan Capaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan**

Menjawab pertanyaan penelitian bagaimana strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan capaian akses air minum jaringan perpipaan? Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- 1) Perlu dilakukan percepatan peningkatan capaian akses air minum jaringan perpipaan yang dapat dilakukan mulai dari optimalisasi bantuan atau proyek dari pemerintah pusat, penambahan investasi untuk operator air minum, meningkatkan dan menjamin kualitas dan kontinuitas layanan air minum,

penyesuaian tarif beli dan jual air minum, sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan, pemanfaatan *idle capacity* yang masih ada, komitmen pengelola air minum daerah terhadap cakupan dan kualitas air minum bagi seluasnya masyarakat.

- 2) Perlu peningkatan efektivitas pengelolaan DAK air minum mulai dari penyusunan skala prioritas pembangunan infrastruktur dan dukungan penguatan usulan kegiatan DAK, penguatan tim pengelola dan penyusunan SOP untuk perbaikan kinerja, mengacu regulasi pelaksanaan dan realisasi anggaran serta fisik kegiatan tepat waktu, penguatan koordinasi, kolaborasi dengan seluruh pihak di berbagai level pemerintahan, serta mengundang seluasnya keterlibatan masyarakat.
- 3) Perlu memastikan dukungan sumber daya manusia (SDM) dan efektivitas kelembagaan. Komitmen pemenuhan SDM perlu dilakukan mulai dari penyusunan tim teknis pengelola DAK, dukungan SDM pada Dinas pengampu air minum untuk pelaksanaan urusan pemerintahan, dan dukungan SDM di level Perumda air minum untuk peningkatan layanan dan jangkauan operasional.
- 4) Perlu memanfaatkan semua potensi sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan air minum. Pemda dapat menginisiasi kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pembangunan dan investasi di sektor air minum dalam skala lebih besar, operator air minum dapat melakukan kerja sama *B to B* dengan operator terdekat dan dunia swasta, dan perlu melakukan pemetaan penggunaan anggaran pembangunan air minum sehingga fokus dan target terpenuhi secara lebih efisien.

## B. Saran

Untuk menjalankan strategi sebagai upaya meningkatkan capaian akses air minum jaringan perpipaan, Pemda Kota Bekasi disarankan untuk melakukan beberapa langkah antara lain:

- 1) Menyusun kebijakan yang berfokus pada *grand design* prioritas pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya air minum. *Grand design* yang disusun harus mengintegrasikan rencana tata ruang, kebijakan, strategi dan rencana aksi yang sudah disusun, serta rencana bisnis Permuda/BUMD/BLUD pada tiap sektor infrastruktur. *Grand design* kemudian lebih dioperasionalkan dengan diintegrasikan pada dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga memiliki kekuatan implementatif.
- 2) Meningkatkan komitmen pimpinan daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk memprioritaskan pembangunan air minum dalam perencanaan maupun penganggaran sebagai bagian dari penerapan amanat undang-undang dan upaya menghadirkan pemerintah daerah dalam pemenuhan layanan dasar air minum yang menjadi hak setiap warga negara.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan mengoptimalkan capaian output dari pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana transfer seperti DAK. Efektivitas pengelolaan dilakukan sejak pengusulan DAK melalui penguatan data dukung dan target yang selaras dengan *grand design* pembangunan infrastruktur daerah dan kebijakan pemerintah pusat, kemudian disediakan SDM yang mumpuni dan profesional untuk mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan DAK, serta mengintensifkan koordinasi antar stakeholder pengelola saat pelaksanaan, monev, sampai dengan pelaporan kegiatan DAK. Sementara optimalisasi capaian output dapat dilakukan dengan memastikan serapan alokasi DAK secara maksimal dan menjaga realisasi pembangunan fisik dengan monitoring dan pengawasan internal yang ketat dan melibatkan unsur kemasyarakatan.

- 4) Memanfaatkan dan memperluas kerja sama dengan daerah dan operator air minum lain seperti dengan Kabupaten Bekasi, dengan SPAM regional Jawa Barat, dan dengan proyek strategis nasional yang menjangkau Kota Bekasi terutama dalam penyediaan sumber air baku. Upaya memastikan stok air baku, peningkatan kapasitas produksi, dan pengelolaan air minum secara lebih luas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber pendanaan alternatif baik dari hibah pemerintah dan swasta maupun dari kerja sama bisnis dengan dunia swasta dan bisnis yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR PUSTAKA

- Alejandro, Portes. (1976): *On the Sociology of National Development: theories and issues*. American Jurnal of Sociology.
- Alexander, M. (1994): *Biodegradation and Bioremediation*. Academic Press: New York.
- Agustino, Leo. (2006): *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Brinkerhoff, D.W dan Wetterberg, A. (2013), "Performance-based public management reforms: experience and emerging lessons from service delivery improvement in Indonesia". *International Review of Administrative Sciences*. Vol. 79, Issue 3.
- DAK Whitepaper. (2011): *Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK)*: Bappenas.
- Greco, Luciano. (2003): *Decentralization Theorem and Public Governance*. Societa Italiana di Economia Publicca.
- Sasana, Hadi. (2005): *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No 1.
- Hani, T. Handoko. (2014): *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, SP. (2014): *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Indrawijaya, A. Ibrahim dan Pranoto. (2011): *Strategi pembaharuan administrasi dan manajemen publik*. Alfabeta: Bandung.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1995): *Pembangunan untuk rakyat, putaka cidesindo*, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1997): *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Kunarjo. (2002): *Perencanaan dan pengendalian program pembangunan*. UI-Press: Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2007): *Penerapan Good Governance di Indonesia*. Laporan Kajian.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan BPKP. (2000): *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*.

- Lewis, B. and Smoke, P. (2012): *Incentives for Better Local Service Delivery. International Conference: Fiscal Decentralization in Indonesia a Decade after Big Bang*. Ministry of Finance.
- Lewis, B. and Smoke, P. (2017): *Intergovernmental Fiscal Transfers and Local Incentives and Responses: The Case of Indonesia*. *Fiscal Studies*. Vol.00 no.0,
- Lewis, Blane D. (2014): *Twelve Years of Decentralization in Indonesia: A Balance Sheet*. In *Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia*, edited by Hal Hill. Institute of Southeast Asian Studies: Singapore.
- Lewis, Blane D. (2014): *Indonesian intergovernmental performance grants: an empirical assessment of impact*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 50, pp. 415–33.
- Mujiwardhani, A., Setiawan, L, dan Nawawi, A. (2022). *Dana Alokasi Khusus di Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI.
- Ni Wayan Ratna Dewi. (2017): *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Aloksi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Akutansi Universitas Udayana* Vol. 2 No.3.
- Nurhayati, Zukhri, N. dan Valeriani, D. (2019): *Efektivitas Pengelolaan PAD, DAU dan DAK terhadap Perkonomian Daerah Pada Era Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. *Indonesian Journal of Accounting and Business*.
- Nugroho, Riant. (2004): *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Nugroho, Riant. (2009): *Publik Policy*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID). (2023). *Overview Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA. 2022*. Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.
- Rasul, Sjahruddin. (2009): *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. *Mimbar Hukum* vol. 2.
- Rondinelli, D, Nellis, J. and Cheema, G. (1983): *Decentralization in Developing Countries*. Staff Working Papers no. 581: World Bank.
- Ruodo, Mohammad. (2018): *The Influence Of Minimum Service Standards (Mss) To Performance Of Local Government To Deliver Services In Indonesia Decentralised System. A Thesis Doctor Of Philosophy School, of Government and Society College of Social Science University of Birmingham*.
- Sahya Anggara dan Li Sumantri. (2016): *Administrasi Pembangunan*. CV Pustaka Setia: Bandung
- Sekretariat Bersama DAK. (2017): *Laporan Akhir DAK Tahun Anggaran 2016*. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri: Jakarta.



- Setiawaty, A dan Hamzah, A. (2007): *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia, Vol.4, No.2.
- Sulaeman, A.S. dan Andriyanto, N. (2021): *Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pertumbuhan pembangunan daerah di Indonesia*. Jurnal Aplikasi Akuntansi, vol. 5 no. 2.
- Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri No. 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, dan 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Sukirno, Sadono. (2007): *Makroekonomi Modern*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi (2003): *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI: Yogyakarta.

#### **Daftar Pustaka dari Situs Internet (web site):**

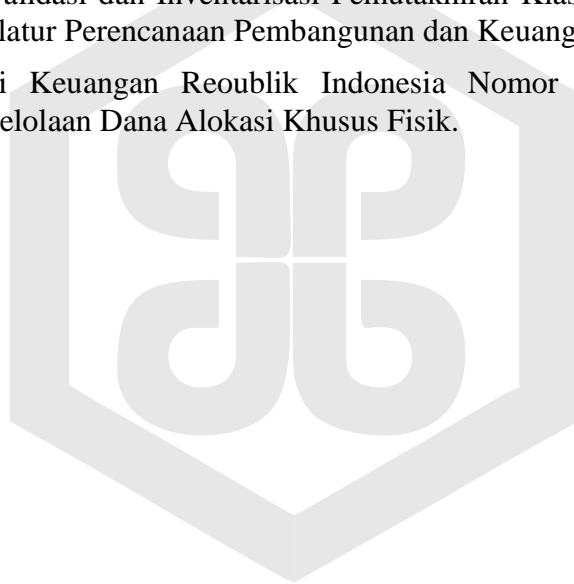
- Himawan, Joni. (2022): *Tantangan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik di masa pandemi*. <https://kaltimtoday.co> diakses pada 30 Oktober 2023.
- Weingast, B. R. (2009): *Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives*. *Journal of Urban Economics*, 65(3), 279–293. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.12.005>

#### **Daftar Pustaka dari Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A